

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2012.
- Arief, Saifuddin. *Hukum Waris Islam dan Praktik Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta Selatan. Darunnajah Production House. 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta. UII Press. 2001.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2015.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2019.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok. PT RajaGrafindo Persada. 2019.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Habiburrahman, H. *Teknik Pembuatan Putusan, Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI*. Bandung. Komisi Yudisial RI. 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-12*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Bandung. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1987.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia: Jakarta. 2012.
- _____. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia. Bandung. 2012.
- _____. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerduta*. Nuansa Aulia. Bandung. 2008.

- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta. Mahkamah Agung. 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2008*. Jakarta. Mahkamah Agung RI. 2009.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi 2013*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2013.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Jakarta. Mahkamah Agung RI. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Pengadilan Negeri Tulung Agung. *Manual Book Pendaftaran e-Waas (Elektronik Waarmerking Service)*. Tulung Agung. Pengadilan Negeri Tulung Agung. 2022.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2009.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta. 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta. Institut Bankir Indonesia. 1993.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 1992.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa. 2004.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa. 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta. 2004.
- _____. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta. Kencana. 2011.

Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta. CV. Rajawali. 1984.

B. Jurnal/Artikel/Tesis/Disertasi

Baharudin. “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 3, (Maret, 2014), hlm. 88 – 101.
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/441>

Christiawan, Rio. “Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo)”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11, No. 3, (Desember, 2018), hlm. 367 – 384.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/302/pdf>

Derika, Dea. “Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap terhadap Autentisitas Akta dihubungkan dengan Asas Kehati-Hatian”, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2, (Juli – Desember, 2020), hlm. 173 – 194.
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/6514/pdf

Kurniawan, I Komang Indra, “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga (*Natuurlijke Persoon*) dalam Hukum Kepailitan terkait Adanya Actio Pauliana”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 1, (Januari, 2015), hlm. 1 – 15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11913>

Mongdong, Steviyanti Veronica. “Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari KUHPperdata”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5, No. 5, (Agustus, 2017), hlm. 108 – 115.

Winarta, Frans Hendra. “Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional”, *Selisik*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hlm. 11 – 36.
<https://journal.univpantasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/622>

Rafaldini, Shafira Meidina, Anita Afriana, dan Pupung Faisal. “Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan Tidak Benar dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik”, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Vol 6, No. 1, (Januari – Juni, 2020), hlm. 55 – 72.
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/101/100>

Rahman, Fikri Ariesta. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap”, *Lex Renaissance*, Vol. 3, No.2, (Juli, 2018), hlm. 423 – 440. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13611>

Ramadhani, Febri. “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan *Waarmerking* dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, (Juli, 2020), hlm. 91 – 111. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9135>

Sukmawirawan, Cita Astungkoro, dkk. “Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan *Waarmerrking* Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris”, Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58960/Cita%20Astungkoro.pdf?sequence=1>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

D. Internet

Anam, Ahmad Z. “Plurium Litis Consortium dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris. Pengadilan Agama Mentok”. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/plurium-litis-consortium-dalam-permohonan-penetapan-ahli-waris-oleh-ahmad-z-anam-8-4> (diakses tanggal 2 Februari 2023).

Balai Harta Peninggalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta. “Surat Keterangan Hak Waris”. <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/surat-keterangan-hak-waris> , (diakses tanggal 22 Desember 2022).

Pramana, R.M. Henky Wibawa Bambang, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad Boediono. “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti”. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/636> , (diakses tanggal 13 Februari 2023).